

**Catatan atas Laporan
Keuangan**

TA. 2019 *Audited*

Tingkat Satuan Kerja



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	63

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Samarinda, 15 April 2020

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. *f*

**BAWASLU**
Yusuf, S.S., M.A. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NIP 197005271998031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 34.360.988. Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 107.260.324.789 atau mencapai 78.92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 135.915.924.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 17.802.353.254 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 12.185.234.138; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5.075.780.857; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 541.338.259. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 15.541.905 dan Rp 17.786.811.349.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 19.877.962 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 110.716.302.582 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp (110.696.424.6200). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 19.091.737 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (110.677.332.883).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 10.639.401.861 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (110.677.332.883) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp (10.000.000) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 117.834.742.371 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 17.786.811.349.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA. 2019		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		34.360.988	100
Jumlah Pendapatan		-	34.360.988	100
Belanja	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	19.024.829.000	8.522.062.641	44.79
Belanja Barang	B.4	116.066.495.000	97.958.135.252	84.40
Belanja Modal	B.5	824.600.000	780.126.896	94.61
Jumlah Belanja		135.915.924.000	107.260.324.789	78.92

II. NERACA

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	10.620.437.678	4.320.062
Belanja dibayar di muka (Prepaid)	C.2	1.528.800.000	4.149.600.000
Persediaan	C.3	35.996.460	985.000
Jumlah Aset Lancar		12.185.234.138	4.154.905.062
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.4	9.280.666.814	8.628.326.718
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	30.500.000	30.500.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	199.033.900	199.033.900
Akumulasi Penyusutan	C.7	(4.434.419.857)	(2.815.866.708)
Jumlah Aset Tetap		5.075.780.857	6.041.993.910
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.8	170.425.000	54.325.000
Aset Lain-lain	C.9	429.869.509	439.869.509
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(58.956.250)	(38.243.750)
Jumlah Aset Lainnya		541.338.259	455.950.759
Jumlah Aset		17.802.353.254	10.652.849.731
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	14.952.586	13.447.870
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.12	589.319	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.541.905	13.447.870
Jumlah Kewajiban		15.541.905	13.447.870
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	17.786.811.349	10.639.401.861
Jumlah Ekuitas		17.786.811.349	10.639.401.861
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		17.802.353.254	10.652.849.731

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2019	31 Des 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	19.877.962	4.476.045
Jumlah Pendapatan		19.877.962	4.476.045
Beban			
Beban Pegawai	D.2	8.522.062.641	1.382.013.301
Beban Persediaan	D.3	35.642.350	47.847.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	56.618.179.522	86.672.646.109
Beban Pemeliharaan	D.5	1.500.588.621	2.257.861.826
Beban Perjalanan Dinas	D.6	42.400.563.799	56.393.429.609
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.639.265.649	1.188.278.425
Jumlah Beban		110.716.302.582	147.942.076.570
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(110.696.424.620)	(147.937.600.525)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.050.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17.810.987	3.246.050
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	(60.839.807)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(769.250)	(59.475)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.8	19.091.737	(57.653.232)
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(110.677.332.883)	(147.995.253.757)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(110.677.332.883)	(147.995.253.757)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2019	31 Des 2018
Ekuitas Awal	E.1	10.639.401.861	30.715.928.845
Surplus / Defisit LO	E.2	(110.677.332.883)	(147.995.253.757)
Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	E.3	(10.000.000)	(8.600.000)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	(10.000.000)	(8.600.000)
Jumlah		(10.000.000)	(8.600.000)
Transaksi Antar Entitas	E.4	117.834.742.371	127.927.326.773
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		7.147.409.488	(20.076.526.984)
Ekuitas Akhir	E.5	17.786.811.349	10.639.401.861

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

*Dasar
Hukum dan
Profil Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga)

Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
- b) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- c) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara

berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/ Aplikasi</i> Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	19.024.829.000	19.024.829.000
Belanja Barang	114.767.521.000	116.066.495.000
Belanja Modal	824.600.000	824.600.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	134.616.950.000	135.915.924.000

Realisasi

Pendapatan

Rp 34.360.988

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 34.360.988. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Timur merupakan pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan jasa giro, dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.050.000	100
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	3.303.088	100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	8.742.113	100
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20.265.787	100
Jumlah	-	34.360.988	100

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp 2.050.000 merupakan penjualan melalui lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui internet dengan metode *Open Bidding* oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda pada Rabu, 13 Februari 2019 yaitu barang inventaris terdiri dari beberapa peralatan kantor dengan kondisi rusak berat. Pendapatan disetorkan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor NTPN 32C1D3JC3B2E8EDI.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa dan Giro) Rp 3.303.088 terdiri dari pendapatan jasa giro sebesar Rp. 1.820.062 dan Rp 1.483.026. Pendapatan jasa giro sebesar Rp 1.820.062 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Tahun 2018 yang belum disetor. Jasa giro ini dilakukan penyetoran pada tanggal 19 Maret Tahun 2019. Sedangkan pendapatan jasa giro sebesar Rp 1.483.026 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Bulan Maret – Juni 2019 yang disetorkan pada tanggal 11 November

2019.

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp 3.608.683 merupakan denda atas keterlambatan pekerjaan Pengadaan Buku Saksi Parpol selama 5 (lima) hari dan Rp 5.133.430 merupakan kekurangan denda atas keterlambatan pekerjaan Pengadaan Buku Saksi Parpol berdasarkan hasil reuiu BPKP.

Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp 20.265.787 terdiri dari Rp. 2.500.000 merupakan penyeteroran kelebihan pembayaran Honorarium Staff Pelaksana Bawaslu Kabupaten PPU untuk tahun 2018; Rp 2.160.000 merupakan pengembalian Perjudin terkait monitoring Pendaftaran Pengawas TPS di Kutai Kartanegara pada 23 – 24 Februari 2019 a.n. Senjaya Ibrata; Rp 4.789.227 merupakan pengembalian Perjudin dalam rangka Kegiatan Koordinasi terkait Kelompok Kerja (Pokja) di Bawaslu Paser pada 16 – 18 November 2018 a.n. Senjaya Ibrata; Rp 5.478.023 merupakan pengembalian Perjudin dalam rangka menghadiri Rapat Sosialisasi Buku Saku dan Rakor Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Anggaran Lingkup Bawaslu RI dan Provinsi pada 23 – 30 Agustus 2018 a.n. Senjaya Ibrata; Rp 3.378.537 merupakan pengembalian Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh Kabupaten PPU TA 2018; Rp 1.960.000 merupakan pengembalian Perjudin monitoring Pertanggungjawaban Keuangan APBN terkait penyelesaian TUP Nihil September dan Oktober 2018 ke Kabupaten Paser a.n. Andri Hermawan.

Realisasi Pendapatan Jasa Per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 995.22% dibandingkan TA 2018. Kenaikan yang signifikan terjadi dikarenakan pada TA 2019 terdapat Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL tahun 2018 yang disetorkan di tahun 2019 dan Pendapatan Jasa Giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.050.000	-	100
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3.303.088	230.620	1,432.26
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	2.655.983	(100)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.742.113	-	100
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	20.265.787	566.000	3,580.53
Jumlah	34.360.988	3.452.603	995.22

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp 107.260.324.789*

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 107.260.324.789 atau 78.92% dari anggaran belanja sebesar Rp 135.915.924.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		% Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	19.024.829.000	8.522.062.641	44.79
Belanja Barang	116.066.495.000	97.958.135.252	84.40
Belanja Modal	824.600.000	780.126.896	94.61
Total Belanja Kotor	135.915.924.000	107.260.324.789	78.92
Pengembalian			-
Jumlah	135.915.924.000	107.260.324.789	78.92

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja Per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 31.66% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Penurunan yang signifikan terjadi pada belanja modal yang turun sebesar 82.54% dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	8.522.062.641	1.382.013.301	616.64
Belanja Barang	97.958.135.252	151.092.882.587	(35.17)
Belanja Modal	780.126.896	4.468.548.900	(82.54)
Jumlah	107.260.324.789	156.943.444.788	(31.66)

Realisasi

Belanja Pegawai

Rp 8.522.062.641

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 8.522.062.641 dan Rp 1.382.013.301. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Per 31 Desember 2019 mengalami Kenaikan Sebesar 516.64% dari TA 2018. Kenaikan yang signifikan terdapat pada belanja uang

kehormatan yang naik sebesar 786.90% dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2018 Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang awalnya berjumlah 3 (tiga) orang mendapat tambahan Anggota sebanyak 2 (Dua) Orang, sehingga jumlah anggota menjadi 5 (Lima) orang. Selain itu dengan dipatenkannya Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota maka muncul mata anggaran untuk Uang Kehormatan Komisioner Bawaslu Kab/Kota.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	316.078.957	138.708.824	127.87
Belanja Uang Kehormatan	7.559.519.600	852.350.000	786.90
Belanja Uang Makan PNS	52.426.900	20.116.800	160.61
Belanja Lembur	59.118.450	35.566.200	66.22
Belanja Tunjangan Khusus / Kegiatan	534.919.192	335.271.477	59.55
Jumlah Belanja Kotor	8.522.063.099	1.382.013.301	516.64
Pengembalian Belanja Pegawai	(458)	-	-
Jumlah Belanja	8.522.062.641	1.382.013.301	516.64

*Realisasi
Belanja Barang
Rp 97.958.135.252*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 97.958.135.252 dan Rp 151.092.882.587. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 35.17% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan karena pada TA 2018 terdapat belanja barang atas hibah pengawasan pemilihan Gubernur Tahun 2018 pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	31.445.713.620	60.283.720.229	(47.84)
Belanja Barang Non Operasional	12.562.787.005	15.967.869.222	(21.32)
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	39.412.500	26.578.725	148.29
Belanja Jasa	10.028.334.507	16.052.178.787	(37.53)
Belanja Pemeliharaan	1.500.588.621	2.263.091.181	(33.69)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	42.435.851.704	56.507.993.043	(24.90)
Jumlah Belanja Kotor	98.012.687.957	151.101.431.187	(35.13)
Pengembalian Belanja	(54.552.705)	(8.548.600)	(638.15)
Jumlah Belanja	97.958.135.252	151.092.882.587	(35.17)

Realisasi

*Belanja Modal
Rp 780.126.896*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 780.126.896 dan Rp 4.468.548.900. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 82.54% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.026.896	4.269.515.000	(84.45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	116.100.000	199.033.900	(41.67)
Jumlah Belanja Kotor	780.126.896	4.468.548.900	(82.54)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	780.126.896	4.468.548.900	(82.54)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp
10.620.437.678*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 10.620.437.678 dan Rp 4.320.062.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas ini terdiri dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 11.659.108 dan Kas Lainnya di Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah sebesar Rp 10.608.778.570.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 11.659.108 terdiri dari

- a. Jasa Giro sebesar Rp 16.488 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Februari 2019 yang belum disetor. Jasa giro ini disetorkan pada tanggal 9 Januari 2020 dengan nomor NTPN ADBF37QLTJF626K8.
- b. Jasa Giro sebesar Rp 9.636.335 merupakan jasa giro atas Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung Bawaslu Kota Balikpapan Bulan November dan Desember 2019 yang belum disetor. Jasa giro ini disetorkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor NTPN 4158555DE3R36F03.
- c. Jasa Giro sebesar Rp 261.966 merupakan jasa giro atas Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan November dan Desember 2019 yang belum disetor. Jasa giro ini disetorkan ke Rekening Penerimaan

Daerah Kutai Kartanegara pada tanggal 2 Januari 2020.

- d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp 432.500 merupakan saldo pajak yang belum disetor atas transaksi yang berasal dari dana hibah Bawaslu Kota Balikpapan.
- e. Pajak yang belum disetor sebesar Rp 156.819 merupakan saldo pajak yang belum disetor atas transaksi yang berasal dari dana hibah Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan telah disetorkan seluruhnya pada 15 Januari 2020.
- f. Setoran awal atas Pembukaan Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung Bawaslu Kabupaten Berau setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp 1.155.000.

Sedangkan Kas Lainnya di Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah sebesar Rp 10.608.778.570 terdiri dari

- a. Kas Hibah Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp 4.528.246.300;
- b. Kas Hibah Bawaslu Kabupaten Berau sebesar Rp 144.602.500;
- c. Kas Hibah Bawaslu Kota Bontang sebesar Rp 137.374.789;
- d. Kas Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp 2.123.351.056;
- e. Kas Hibah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 126.487.291;
- f. Kas Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 378.644.400;
- g. Kas Hibah Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebesar

Rp 3.170.334.200;

*Belanja Dibayar
Di Muka Rp.
(Prepaid) Rp.
1.528.800.000*

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.528.800.000 dan Rp. 4.149.600.000. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Ini Merupakan Sewa Kendaraan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur dengan total nilai sewa sebesar Rp. 4.368.000.000 Untuk 20 Bulan terhitung dari bulan Desember 2018. Adapun form sewa dibayar dimuka tersaji di lampiran laporan keuangan ini.

C.3 Persediaan

*Persediaan Rp
35.996.460*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 35.996.460 dan Rp 985.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	35.996.460	985.000
Jumlah	35.996.460	985.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari

- a. Alat tulis (1010301001) sebesar Rp 146.400

- b. Tinta tulis, tinta stempel (1010301002) sebesar Rp 9.225
- c. Penjepit kertas (1010301003) sebesar Rp 36.450
- d. Ordner dan map (1010301006) sebesar Rp 218.550
- e. Cutter (1010301008) sebesar Rp 2.275
- f. Alat perekat (1010301010) sebesar Rp 43.500
- g. Alat tulis kantor lainnya (1010301999) sebesar Rp 47.925
- h. Kertas HVS (1010302001) sebesar Rp 468.375
- i. Berbagai kertas (1010302002) sebesar Rp 339.200
- j. Amplop (1010302004) sebesar Rp 56.900
- k. Kertas dan Cover Lainnya (1010302999) yang terdiri dari kertas materai 6000, kertas materai 3000 dan cetakan buku saksi parpol sebesar Rp 34.475.960. Cetakan buku saksi parpol merupakan sisa buku saksi peserta pemilu berdasarkan hasil *stock opname* pada Bawaslu Kab/Kota (rekapitulasi terlampir) sebanyak 8.816 buah.
- l. Bahan komputer lainnya (1010304999) sebesar Rp 108.750
- m. Batu baterai (1010306010) sebesar Rp 42.950.

*Peralatan dan
Mesin
Rp 9.280.666.814*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp 9.280.666.814 dan Rp 8.628.326.718. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2019	8.628.326.718
Mutasi Tambah	
Pembelian	664.026.896
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Barang Ekstrakomptabel	11.686.800
Saldo Per 31 Desember 2019	9.280.666.814
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(4.425.459.440)
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	4.866.894.174

Barang ekstrakomptabel tersebut merupakan pembelian belanja modal (*voice recorder*) yang bernilai kurang dari nilai kapitalisasi.

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa

- a. Access Point 802.11 BGN (3.10.02.04) sebesar Rp 3.600.000
- b. CCTV (3.05.01.05) sebesar Rp 148.187.800
- c. Fingerprint (3.06.02.07) sebesar Rp 48.137.500
- d. LCD Projector / Infocus (3.05.01.05) sebesar Rp 29.999.999
- e. Lemari Besi / Metal (3.05.01.04) sebesar Rp 22.352.800
- f. Mic Conference (3.05.02.06) sebesar Rp 99.420.000
- g. Repeater and Transceiver (3.10.02.04) sebesar Rp 5.000.000
- h. Router (3.10.02.04) sebesar Rp 6.000.000
- i. Scanner (3.10.02.03) sebesar Rp 147.162.500
- j. Sice Sofa Tamu (3.05.02.01) sebesar Rp 24.999.997
- k. Sound System (3.05.02.06) sebesar Rp 99.479.500
- l. Voice Recorder (3.06.01.01) sebesar Rp 29.686.800

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
30.500.000*

C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 30.500.000 dan Rp 30.500.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2019	30.500.000
Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	30.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(8.960.417)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	21.539.583

*Aset Tetap
Lainnya Rp.
199.033.900*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. 199.033.900 dan Rp. 199.033.900. Aset tetap lainnya ini merupakan renovasi atas gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
4.434.419.857*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 4.434.419.857 dan Rp 2.815.866.708. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah

sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2019 dan
2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.280.666.814	4.425.459.440	4.855.207.374
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.500.000	8.960.417	21.539.583
Jumlah		9.510.200.714	4.434.419.857	5.075.780.857

*Aset Tak
Berwujud Rp
170.425.000*

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp 170.425.000 dan Rp 54.325.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2019	54.325.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	116.100.000
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2019	170.425.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(58.956.250)
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	111.468.750

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud sebagai berikut

a. Website Bawaslu Kota Samarinda (8.01.01.01) sebesar

Rp 15.000.000

- b. Website Bawaslu Kabupaten Berau (8.01.01.01) sebesar Rp 14.600.000
- c. Website Bawaslu Kota Bontang (8.01.01.01) sebesar Rp 12.000.000
- d. Website Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (8.01.01.01) sebesar Rp 15.000.000
- e. Website Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (8.01.01.01) sebesar Rp 15.000.000
- f. Website Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (8.01.01.01) sebesar Rp 15.000.000
- g. Website Bawaslu Kota Balikpapan (8.01.01.01) sebesar Rp 14.500.000
- h. Website Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu (8.01.01.01) sebesar Rp 15.000.000

*Aset Lain lain Rp
429.869.509*

C.9 Aset lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing sebesar Rp. 429.869.509 dan Rp. 439.869.509. Aset lain-lain ini merupakan sisa kas dana hibah pilkada tahun 2015 pada panwas kota samarinda yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp. 429.869.509.

Saldo per 01 Januari 2019	439.869.509
Mutasi Tambah	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-
Mutasi Kurang	
Pengembalian ke Kas Daerah	10.000.000
Saldo per 30 September 2019	429.869.509

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
58.956.250*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp 58.956.250 dan Rp 38.243.750. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
Software	170.425.000	58.956.250	111.468.750
Jumlah	170.425.000	58.956.250	111.468.750

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 14.952.586

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 14.952.586 dan Rp 13.447.870. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari belanja yang masih harus dibayar atas langganan listrik kantor Bawaslu Provinsi bulan Desember 2019 sebesar Rp 4.966.005, Langganan Air PDAM Bawaslu Provinsi sebesar Rp 1.643.979, Langganan Air PDAM Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 126.050, Langganan listrik Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Rp 2.052.921, Langganan Air PDAM Bawaslu Kota Bontang sebesar Rp 632.500, Langganan Listrik Bawaslu Kota Bontang sebesar Rp 2.155.310, Langganan Air PDAM Bawaslu Kabupaten Berau sebesar Rp 176.400, Langganan Air PDAM Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp 376.727, Langganan Air PDAM Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 6.700, Langganan listrik Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 1.110.628, Langganan Air PDAM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 288.400 serta Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp 1.416.966.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 589.319

C.12 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 589.319 dan Rp 0. Utang Jangka Pendek Lainnya ini terdiri dari pajak yang belum disetor oleh Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp 432.500 dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 156.819.

Ekuitas

Rp 17.786.811.349

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 17.786.811.349 dan Rp 10.639.401.861. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBPNP
Rp 19.877.962

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 19.877.962 dan Rp 4.476.045. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis Pendapatan	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Giro	11.135.849	1.820.062	512
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	8.742.113	-	100
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	2.655.983	(100)
Jumlah	19.877.962	4.476.045	344.10

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp 3.608.683 merupakan denda atas keterlambatan pekerjaan Pengadaan Buku Saksi Parpol selama 5 (lima) hari dan Rp 5.133.430 merupakan kekurangan denda atas keterlambatan pekerjaan Pengadaan Buku Saksi Parpol berdasarkan hasil reuiu BPKP.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa dan Giro) Rp 11.135.849 terdiri dari pendapatan jasa giro sebesar Rp 1.483.026, jasa giro yang belum disetor sebesar Rp 16.488 dan Rp 9.636.335. Pendapatan jasa giro sebesar Rp 1.483.026 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Bulan Maret – Juni 2019 yang disetorkan pada tanggal 11 November

2019. Sedangkan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp 16.488 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Bulan Juli 2019 dan Rp 9.636.335 merupakan jasa giro atas Rekening Penerimaan Dana Hibah Bawaslu Kota Balikpapan Bulan November – Desember 2019.

Beban Pegawai

Rp 8.522.062.641

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 8.522.062.641 dan Rp 1.382.013.301. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada TA 2019 mengalami kenaikan Beban Pegawai sebesar 516,64% dibanding TA 2018. Kenaikan yang signifikan terdapat pada beban uang kehormatan yang naik sebesar 786,90% dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2018 Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang awalnya berjumlah 3 (tiga) orang mendapat tambahan Anggota sebanyak 2 (Dua) Orang, sehingga jumlah anggota menjadi 5 (Lima) orang. Selain itu dengan dipatenkannya Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota maka muncul mata anggaran untuk Uang Kehormatan Komisioner Bawaslu Kab/Kota.

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	203.170.640	63.316.400	220.88
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.579	1.329	169.30
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	9.115.944	6.331.640	43.97
Beban Tunj. Anak PNS	2.505.828	1.311.554	91.06
Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	
Beban Tunj. PPh PNS	32.469.988	17.101.241	89.87
Beban Tunj. Beras PNS	11.297.520	5.286.660	113.70
Beban Uang Makan PNS	52.426.900	20.116.800	160.61
Beban Tunjangan Umum PNS	17.195.000	5.040.000	241.17
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	7.559.519.600	852.350.000	786.90
Beban Uang Lembur	59.118.450	35.566.200	66.22
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	534.919.192	335.271.477	59.55
Jumlah Beban Kotor	8.522.063.099	1.382.013.301	516.64

*Beban Persediaan
Rp 35.642.350*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 35.642.350 dan Rp 47.847.300. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	35.642.350	47.847.300	(25.51)
Jumlah	35.642.350	47.847.300	(25.51)

*Beban Barang dan
Jasa Rp
56.618.179.522*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 56.618.179.522 dan Rp 86.672.646.109. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada TA 2019 terjadi penurunan Beban Barang dan Jasa sebesar 34,68% dibanding TA 2018. Penurunan yang signifikan terdapat pada beban jasa profesi, beban honor output kegiatan, beban keperluan perkantoran dan beban langganan daya dan jasa. Penurunan beban-beban tersebut disebabkan adanya hibah pengawasan pemilihan Gubernur Kaltim tahun 2018 serta berlangsungnya tahapan Pileg Pilpres tahun 2019 di tahun anggaran 2018. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2019 dan
2018*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	28.851.469.450	56.852.936.136	(49.25)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	881.390.000	1.144.850.000	(23.01)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.702.431.670	304.959.095	458.25
Beban Bahan	10.530.213.345	11.700.601.722	(10.00)
Beban Honor Output Kegiatan	1.858.740.000	4.265.787.500	(56.43)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	133.026.000	-	
Beban Langganan Listrik	554.849.811	732.658.340	(24.27)
Beban Langganan Telepon	125.172.000	208.216.468	(39.88)
Beban Langganan Air	200.209.546	328.690.077	(39.08)
Beban Jasa Pos dan Giro	665.000	549.000	21.12
Beban Jasa Konsultan	29.850.000	12.000.000	148.75
Beban Sewa	10.522.425.900	8.768.991.121	20
Beban Jasa Profesi	730.450.000	1.712.000.000	(57.33)
Beban Jasa Lainnya	485.600.000	640.406.650	(24.17)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	11.686.800	-	
Jumlah	56.618.179.522	86.672.646.109	(34.68)

*Beban
Pemeliharaan
Rp 1.500.588.621*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.500.588.621 dan Rp 2.257.861.826. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Pada tahun 2019 terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar 33,54% dibanding tahun 2018. Penurunan yang signifikan terdapat pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 37,02%, penurunan ini disebabkan oleh tingginya aktivitas kegiatan pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur dalam kegiatan pengawasan pemilihan Gubernur Tahun 2018 serta tahapan pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 di Tahun Anggaran 2018. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2019
dan 2018*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	311.603.750	370.022.600	(15.79)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.188.984.871	1.887.839.226	(37.02)
Jumlah	1.500.588.621	2.257.861.826	(33.54)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp 42.400.563.799

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 42.400.563.799 dan Rp 56.393.429.609. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jika dibandingkan dengan TA 2018 Beban Perjalanan Dinas pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 24,81%, hal ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pengawasan karena pada tahun anggaran 2019 hanya berlangsung Tahapan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	19.649.857.883	25.724.880.251	(23.62)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.824.403.163	7.555.195.000	(9.67)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.926.302.753	23.113.354.358	(31.09)
Jumlah	42.400.563.799	56.393.429.609	(24.81)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp 1.639.265.649

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.639.265.649 dan Rp 1.188.278.425. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.617.457.315	1.165.645.919	38.76
Beban Penyusutan Jaringan	1.095.834	1.095.834	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	19.036.672	(100)
Jumlah Penyusutan	1.618.553.149	1.185.778.425	36.50
Beban	20.712.500	2.500.000	728.50

Amortisasi Software			
Jumlah Amortisasi	20.712.500	2.500.000	728.50
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	1.639.265.649	1.188.278.425	37.95

Surplus/Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar Rp 2.050.000

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.050.000 dan Rp 60.839.807.

Rincian Kegiatan Penjualan Aset Non Lancar TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.050.000	-	100
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(60.839.807)	(100)
Surplus (Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar	2.050.000	(60.839.807)	

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 17.041.737

D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut

*Rincian Kegiatan Non Operasional Lainnya
TA 2019 dan 2018*

Uraian	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	17.765.787	3.066.000	479.45
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	45.200	180.050	(74.90)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(769.250)	(59.475)	1,193.4
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	17.041.737	3.186.575	434.80

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 10.639.401.861

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 10.639.401.861 dan Rp 30.715.928.845.

Defisit LO
Rp 110.677.332.883

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 110.677.332.883 dan Rp 147.995.253.757. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
Rp 0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas
Rp 10.000.000

E.4 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 10.000.000 dan Rp 8.600.000 yaitu sebagai berikut

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp 0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp 0*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan / Aset Tetap / Aset Lainnya.

*Selisih Revaluasi
Aset Rp 0*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp 0*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain Lain
Rp 10.000.000*

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 10.000.000 dan Rp 8.600.000. Koreksi lain-lain tersebut merupakan pengembalian ke kas daerah dari Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp. 10.000.000 dari total keseluruhan senilai Rp. 448.469.509

*Transaksi Antar
Entitas
Rp 117.834.742.371*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 117.834.742.371 dan Rp 127.927.326.773. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	106.161.618.359
Diterima dari Entitas Lain	(34.360.988)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	11.707.485.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	117.834.742.371

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp 34.360.988 sedangkan DKEL sebesar Rp 106.161.618.359.

DDEL sebesar Rp. 34.360.988 ini terdiri dari

- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp 2.050.000 merupakan penjualan melalui lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui internet dengan metode *Open Bidding* oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda pada Rabu, 13 Februari 2019 yaitu barang inventaris terdiri dari beberapa peralatan kantor dengan kondisi rusak berat.
- b. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa dan Giro) Rp 3.303.088 terdiri dari pendapatan jasa giro

sebesar Rp. 1.820.062 dan Rp 1.483.026. Pendapatan jasa giro sebesar Rp 1.820.062 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Tahun 2018 yang belum disetor. Jasa giro ini dilakukan penyetoran pada tanggal 19 Maret Tahun 2019. Sedangkan pendapatan jasa giro sebesar Rp 1.483.026 merupakan jasa giro atas Rekening APBN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Bulan Maret – Juni 2019 yang disetorkan pada tanggal 11 November 2019.

c. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp 3.608.683 merupakan denda atas keterlambatan pekerjaan Pengadaan Buku Saksi Parpol selama 5 (lima) hari dan Rp 5.133.430 merupakan kekurangan denda atas keterlambatan pekerjaan Pengadaan Buku Saksi Parpol berdasarkan hasil reviu BPKP.

d. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp 20.265.787 terdiri dari Rp. 2.500.000 merupakan penyetoran kelebihan pembayaran Honorarium Staff Pelaksana Bawaslu Kabupaten PPU untuk tahun 2018; Rp 2.160.000 merupakan pengembalian Perjadin terkait monitoring Pendaftaran Pengawas TPS di Kutai Kartanegara pada 23 – 24 Februari 2019 a.n. Senjaya Ibrata; Rp 4.789.227 merupakan pengembalian Perjadin dalam rangka Kegiatan Koordinasi terkait Kelompok Kerja (Pokja) di Bawaslu Paser pada 16 – 18 November 2018 a.n. Senjaya Ibrata; Rp 5.478.023 merupakan pengembalian Perjadin dalam rangka menghadiri Rapat Sosialisasi Buku Saku dan Rakor Penguatan Kapasitas

Perencanaan dan Anggaran Lingkup Bawaslu RI dan Provinsi pada 23 – 30 Agustus 2018 a.n. Senjaya Ibrata; Rp 3.378.537 merupakan pengembalian Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh Kabupaten PPU TA 2018; Rp 1.960.000 merupakan pengembalian Perjadin monitoring Pertanggungjawaban Keuangan APBN terkait penyelesaian TUP Nihil September dan Oktober 2018 ke Kabupaten Paser a.n. Andri Hermawan.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.608.778.570 dari total Rp 10.608.778.570 yang diterima sepanjang tahun 2019. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Kota Balikpapan	Uang	4.528.246.300
Pemerintah Kabupaten Berau	Uang	144.602.500
Pemerintah Kota Bontang	Uang	137.374.789
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Uang	2.123.351.056
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Uang	126.225.325
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Uang	378.644.400
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Uang	3.170.334.200
Total Pengesahan		10.608.778.570

Ekuitas Akhir

Rp 17.786.811.349

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 17.786.811.349 dan Rp 10.639.401.861.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Januari 2020 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Yusuf, S.Si., M.A.

Pada tahun 2019 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima Dana Hibah Pilkada 2020 untuk 9 (sembilan) kabupaten/kota yaitu Bawaslu Kota Balikpapan, Bawaslu Kabupaten Berau, Bawaslu Kota Bontang, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Paser dan Bawaslu Kota Samarinda. Untuk keperluan menampung dana hibah langsung tersebut telah terbit persetujuan pembukaan rekening Penampungan Dana Hibah Langsung atas nama Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Bank	Nama Rekening	Surat Izin KPPN	Nomor Rekening	Nomor Register
Hibah Bawaslu Kota Balikpapan	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU	S-02301 /WPB.20 /KP.0104/2019	63001000730307	21WM6XTA
Hibah Bawaslu Kabupaten Berau	Kaltimtara	RPL046PDHL BAWASBRU 2N8Y5THA	S-02298 /WPB.20 /KP.0104/2019	0061510559	2N8Y5THA
Hibah Bawaslu Kota Bontang	Kaltimtara	RPL046PDHL BAWASBTG 2MX24GWA	S-02302 /WPB.20 /KP.0104/2019	0081424012	2MX24GWA
Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU	S-02286 /WPB.20 /KP.0104/2019	626-01-000715-30-8	2RRA7CP

Barat		KUBAR UNTUK 2RRA7CP			
Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Mandiri	RPL 046 PDHL BAWASLU KUKAR UNTUK 2ASS7PYA	S-02291 /WPB.20 /KP.0104/2019	148-00-1699156- 7	2ASS7PYA
	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU KUKAR UNTUK 2ASS7PYA	S-02794 /WPB.20 /KP.0104/2019	21201002464300	
Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Mandiri	RPL 046 PDHL BAWASLU KUTIM 28A4AN5A	S-02288 /WPB.20 /KP.0104/2019	148-00-1699537- 8	28A4AN5A
Hibah Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU MAHULU UTK 2LLU4A9A	S-02952 /WPB.20 /KP.046/2019	8003-01-000047- 30-7	2LLU4A9A
Hibah Bawaslu Kabupaten Paser	Kaltimara	RPL046PDHL BAWASLUPSR 23CRIWEA	S-02304 /WPB.20 /KP.0104/2019	0021420387	23CRIWEA
Hibah Bawaslu Kota Samarinda	Mandiri	RPL 046 PDHL BAWASLU SMD UNTUK 255CW6LA	S-02285 /WPB.20 /KP.0104/2019	148-00-1704930- 8	255CW6LA

LAMPIRAN

REKAPITULASI SISA BUKU SAKSI

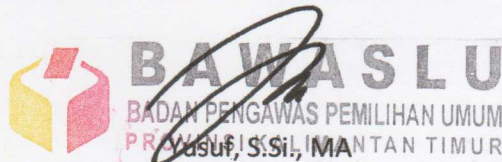
REKAPITULASI SISA BUKU SAKSI PESERTA PEMILU

No	Kabupaten/Kota	Sisa Buku (Buah)	Nilai (Rp)
1	Samarinda	0	Rp -
2	Balikpapan	2.142	Rp 7.893.270
3	Bontang	366	Rp 1.348.710
4	Kutai Timur	971	Rp 3.578.135
5	Kutai Kartanegara	979	Rp 3.607.615
6	Kutai Barat	0	Rp -
7	Mahakam Ulu	554	Rp 2.041.490
8	Penajam Paser Utara	1.890	Rp 6.964.650
9	Paser	0	Rp -
10	Berau	1.914	Rp 7.053.090
Jumlah		8.816	Rp 32.486.960

Samarinda, 17 Maret 2020

Kepala Sekretariat

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



NIP.19700527 199803 1 001

LAMPIRAN

SETOR JASA GIRO REKENING APBN

BAWASLU KAB. KUTAI BARAT



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)**

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820200109578888
Tanggal Billing : 09-01-2020 09:56:43
Tanggal Kedaluwarsa : 16-01-2020 09:56:43
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Kiki Mulyana, A.Md
Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Total Disetor : 16.488 (IDR)
Terbilang : Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Kode Akun : 425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Jumlah Setoran : 16.488 (IDR)
Keterangan : Jasa Giro Bawaslu Kubar bulan Februari 2019

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking* dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor (021)-3868085 atau melalui email ke pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

---o0o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

Tanggal : 09-01-2020 10:30:52

Mo.Resi : 75124A-01/2020/800583 Petugas : 96828290

Tanggal Buku : 09-01-2020

NTP : 941836276362

Kode Cabang Pos : 075000

NTPN : A0BF370LTJF626K8

STAN : 276362

Kode Billing : 820200109578668

Nama : Kiki Mulyana, A.Md

K / L : 115

Unit Eselon : 01

Kode Satker : 686417

Jumlah Setoran : Rp. 16.488 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)



WIK/III/2019

TEK0891

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

LAMPIRAN

SETOR JASA GIRO REKENING HIBAH

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820200212708355
Tanggal Billing : 12-02-2020 07:07:27
Tanggal Kedaluwarsa : 19-02-2020 07:07:27
Tanggal Bayar : 12-02-2020 14:24:21
Bank/Pos Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Kiki Mulyana, A.Md
Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Total Disetor : 9.636.335 (IDR)
Terbilang : Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 200212259760
NTPN : 4158555DE3R36F03

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Kode Akun : 425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Jumlah Setoran : 9.636.335 (IDR)
Keterangan : Pendapatan Jasa Giro atas Rekening Hibah Bawaslu Balikpapan T.A 2019

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 12/02/2020 14:24:21 NTB : 200212259760
Tanggal Buku : 12/02/2020 NTPN : 4158555DE3R36F03
Kode Cab. Bank : 0630 STAN : 562151

Data Setoran:

Kode Billing : 820200212708355
Nama Wajib Bayar : Kiki Mulyana, A.Md
Kementerian/Lembaga : 115
Unit Eselon I : 01
Satuan Kerja : 686417
Jumlah Setoran : Rp. 9,636,335.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA
RATUS TIGA PULUH LIMA RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

Kiki Mulyana, A.Md 0000 0000 9636335.00 12022020 12022020 4158555DE3R36F03
200212259760 562151 139

LAMPIRAN

**SETOR JASA GIRO REKENING HIBAH
BAWASLU KAB. KUTAI KARTANEGARA**

Rincian Transaksi / No. Referensi
Description / Reference No.

Debet / Kredit
Debet / Credit

Balance

51.947,01

174,006,586.30
174,064,533.31
174,052,943.91

SLIP SETORAN

Lembar ke-1 : Untuk Bank
Lembar ke-2 : Untuk Nasabah
Lembar ke-3 : Untuk Atsnp



bankaltimara

Rekening

Giro Deposito Simpeda Al Amin

Nama Penyetor

Muliamanda Adma Juniansyah

Alamat Penyetor

TN. DIPONEGRO

Jumlah Setoran

261.996.91

Terbilang

Dua Ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh satu Sen.

Keterangan

Pembayaran Jala Giro Baweslu Kukor

Tanggal

20 Januari 2020

Mata Uang

IDR USD

Jenis Setoran

Setoran Tunai Setoran Bg/Cek

Nomor Rekening

0041300019

Nama Pemilik Rekening

KAS DAU PAH

No. Telp/HP

XXXXXXXXXXXX Ekim Dugumak

Jumlah yang dikredit

Untuk Jumlah Setoran Rp. 100.000.000,- atau lebih :

a. Sumber Dana

b. Tujuan Penggunaan Dana

c. Wajib melampirkan copy Kartu Identitas jika transaksi dilakukan oleh bukan pemilik rekening/wakil-in customer



Bankaltimara Teller

Penyetor

Keterangan:
1. Setoran sah jika ada vedokan atau tanda tangan penyetor bank
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah data diterima dengan baik

Validasi :

7700 K 0041300019 REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR
DR *****261.996.91* T IRANDA.224
004 KTM004TL01 D11004TL02 00000 224
15-11-18 20-01-2020 20-01-2020 20-01-2020 002

LAMPIRAN

BUKTI BAYAR PAJAK YANG BELUM DISETOR

BAWASLU KAB. MAHAKAM ULU



NPWP : 73.545.497.7-728.000
 NAMA : BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEM
 ALAMAT : KP LONG BAGUN ILIR - KAB. MAHAKAM ULU
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411211
 JENIS SETORAN : 920
 MASA PAJAK : 01-01
 TAHUN PAJAK : 2019
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.136.364
 TERBILANG : Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah

URAIAN : Belanja Bahan ATK Sekretariat Bawaslu Kab. Mahakam Ulu bulan Desember 2019

NPWP PENYETOR : 73.545.497.7-728.000
 NAMA PENYETOR : BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PE

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0236 1550 8392 108
 MASA AKTIF : 14/02/2020 06:56:28

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Data Pembayaran : 15/01/2020 10:02:00 NTR : 001894163119
 Tanggal buku : 15/01/2020 NTR : E008F00LF9KXG45C
 Kode Cabang Bank : 166
 Data Setoran : 023615508392108
 NPWP : 73545497728000
 Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEM
 Alamat : KP LONG BAGUN ILIR - KAB. MAHAKAM ULU
 Nomor Objek Pajak :
 Masa Pengangaran : 411211
 Jenis Setoran : 920
 Masa Pajak : 01012019
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000000
 Jumlah Setoran : 136.364 Mata Uang : IDR
 Terbilang : SERATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUP
 IAH

Penerimaan Pajak



NPWP : 73.545.497.7-728.000
 NAMA : BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEM
 ALAMAT : KP LONG BAGUN ILIR - KAB. MAHAKAM ULU

 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411122
 JENIS SETORAN : 920
 MASA PAJAK : 01-01
 TAHUN PAJAK : 2019
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.20.455
 TERBILANG : Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

 URAIAN : Belanja Bahan ATK Sekretariat Bawaslu Kab. Mahakam Ulu bulan
 Desember 2019

NPWP PENYETOR : 73.545.497.7-728.000
 NAMA PENYETOR : BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PE

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0236 1550 8477 028
 MASA AKTIF : 14/02/2020 06:58:49

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Data Pembayaran :
 Tanggal dan Jam Bayar : 15/01/2020 10:02:23
 NIB : 001894165730
 Tanggal Buku : 15/01/2020
 NTPN : DPER2012V4/C9134
 Kode Cabang Bank : 166
 STAN : 163730
 Kode Billing : 023615508477028
 NPWP : 73545497728000
 Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEM
 Alamat : KP LONG BAGUN ILIR - KAB. MAHAKAM ULU
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411122
 Jenis Setoran : 920
 Masa Pajak : 01012019
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : 20.455 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DUA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH

Penerimaan Pajak